

DISKRIMINASI RASISME WARGA PAPUA DALAM SUDUT PANDANGAN HAM

Ancelina M Nawipa, Mari Esterilita, S.Tr.Sos, Sp.P.S.A , Hastin Trustisari, AKS,M.Si, MS.i
Program Studi Kesejahteraan Sosial, Universitas Binawan

Correspondence

Email: 082211001@student.binawan.ac.id No. Telp:

Submitted: 4 June 2024

Accepted: 13 June 2024

Published: 14 June 2024

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji fenomena rasisme yang dialami oleh warga Papua di Indonesia dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM). Diskriminasi rasial terhadap warga Papua merupakan masalah yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek sosial, politik, dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk-bentuk rasisme yang terjadi, menguraikan faktor-faktor penyebab, dan mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan untuk mengatasi masalah ini. Melalui pendekatan kualitatif, aktivis HAM, dan pakar di bidang ini, serta analisis dokumen dari laporan-laporan resmi dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa warga Papua menghadapi berbagai bentuk diskriminasi, kekerasan fisik, ketidakadilan dalam layanan publik, dan pengucilan sosial. Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun ada beberapa kebijakan yang dirancang untuk melindungi hak-hak warga Papua, implementasinya seringkali tidak efektif dan tidak konsisten. Berdasarkan temuan ini, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat kebijakan anti-diskriminasi, meningkatkan pendidikan tentang HAM, dan memperbaiki sistem peradilan untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi warga Papua. Upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas internasional juga diperlukan untuk mengatasi masalah ini secara menyeluruh. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang rasisme terhadap warga Papua dan menekankan pentingnya tindakan nyata untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia bagi semua warga negara Indonesia.

Kata Kunci: rasisme, warga Papua, hak asasi manusia, kebijakan anti-diskriminasi

PENDAHULUAN

Masyarakat Papua seringkali menghadapi diskriminasi rasial di banyak bidang kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan publik, diskriminasi ini tidak hanya mencakup kebijakan yang tidak adil namun juga sikap dan perlakuan yang merendahkan atau merugikan.

Terdapat banyak laporan mengenai kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat Papua yang dilakukan oleh aparat keamanan dan kelompok masyarakat lainnya, hal ini mencakup kekerasan fisik, penahanan sewenang-wenang dan tindakan represif lainnya yang melanggar hak-hak dasar.

Masyarakat Papua seringkali mengalami marginalisasi dalam pembangunan ekonomi dan sosial, mereka kekurangan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan peluang ekonomi dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia.

Masyarakat Papua seringkali menjadi korban prasangka dan stereotip negatif yang melekat pada pandangan sebagian masyarakat Indonesia, hal ini menciptakan hambatan sosial yang lebih besar bagi mereka untuk berinteraksi dan berintegrasi dengan masyarakat luas.

Respons pemerintah terhadap konflik dan ketegangan di Papua seringkali dianggap tidak adil dan berat sebelah, pendekatan militeristik dan kurangnya dialog konstruktif memperburuk situasi dan menambah penderitaan masyarakat Papua, masyarakat Papua seringkali merasa kurang terwakili secara politik, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Hal ini meningkatkan rasa ketidakadilan dan ketidakpuasan mereka terhadap pemerintah pusat, permasalahan ini menunjukkan bahwa rasisme terhadap masyarakat Papua bukan sekedar diskriminasi individu, namun mencakup struktur dan institusi yang lebih luas yang memperkuat

ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia, Untuk mengatasi masalah ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan yang mencakup reformasi kebijakan peningkatan kesadaran masyarakat, dan langkah nyata untuk mengakhiri diskriminasi dan kekerasan, persoalan rasisme terhadap masyarakat Papua di Indonesia merupakan persoalan kompleks yang berakar pada sejarah, politik, masyarakat, dan budaya.

Dari perspektif hak asasi manusia (HAM), permasalahan ini dapat diidentifikasi dalam beberapa aspek utama masyarakat Papua kerap menghadapi diskriminasi rasial di berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan publik.

Diskriminasi ini tidak hanya mencakup kebijakan yang tidak adil namun juga sikap dan perlakuan yang merendahkan atau merugikan, Ada banyak laporan bahwa masyarakat Papua menghadapi kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di tangan aparat keamanan dan kelompok masyarakat lainnya hal ini mencakup kekerasan fisik, penahanan sewenang-wenang, dan tindakan represif lainnya yang melanggar hak-hak dasar respons pemerintah terhadap konflik dan ketegangan di Papua seringkali dianggap tidak adil dan berat sebelah.

Pendekatan militeristik dan kurangnya dialog konstruktif memperburuk situasi dan menambah penderitaan masyarakat Papua, masyarakat Papua mempunyai hak-hak khusus yang diakui undang-undang, termasuk otonomi khusus bagi Papua.

Namun penegakan hak-hak tersebut seringkali tidak efektif dan tidak memberikan manfaat yang maksimal, masyarakat Papua seringkali merasa kurang terwakili secara politik, baik di tingkat lokal maupun nasional. hal ini meningkatkan rasa ketidakadilan dan ketidakpuasan mereka terhadap pemerintah pusat.

Permasalahan ini menunjukkan bahwa rasisme terhadap masyarakat Papua bukan sekedar diskriminasi individu, namun mencakup struktur dan institusi yang lebih luas yang memperkuat ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Untuk mengatasi masalah ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan yang mencakup reformasi kebijakan, peningkatan kesadaran masyarakat, dan langkah nyata untuk mengakhiri diskriminasi dan kekerasan.

METODE PENELITIAN

Penggunaan metode penelitian kualitatif sangat ideal untuk menyelidiki topik 'Rasisme terhadap Papua dari perspektif hak asasi manusia'. Metode ini memungkinkan dilakukannya dengan menggunakan studi kasus. Metode yang paling sesuai mungkin melibatkan kombinasi dari beberapa pendekatan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang rasisme terhadap warga Papua dari sudut pandang HAM. Kombinasi studi kasus, wawancara kualitatif, dan analisis dokumen mungkin menjadi pendekatan yang paling efektif untuk penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Diskriminasi terhadap masyarakat adat Papua masih menjadi isu mendesak, berkontribusi terhadap konflik dan intoleransi terhadap keberagaman. Masalah ini terjadi karena suatu alasan, Pasti ada sejarah panjang di balik hal ini, dimulai dengan wacana mengenai orang kulit putih yang beradab versus orang kulit hitam yang tidak beradab. Tindakan rasisme dapat ditemukan di semua bidang kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan bidang lainnya.

Sejak lama, ada anggapan bahwa orang berkulit putih lebih unggul daripada orang berkulit gelap. Namun, rasisme mencakup lebih dari sekedar warna kulit (Nurgiansah & Widyastuti, 2020). Permasalahan rasisme yang kita temui di Indonesia umumnya disebabkan oleh rasa

superioritas ras. Hal ini dibuktikan dengan adanya ujaran kebencian yang diterima dari ras tertentu, termasuk penghinaan terhadap suku lain, agama, dan etnis orang lain sehingga menimbulkan rasa tidak aman dalam masyarakat. Francois Barnier, seorang antropolog dari Prancis mula-mula memaparkan pandangannya terkait diferensiasi manusia berdasarkan golongan atau karakteristik fisiknya, seperti warna kulit dan paras wajahnya. (Lestari, 2015) mengatakan bahwa para ahli antropologi mengkondisikan karakter pembeda ras menjadi 2. Terlihat dari segi fisiologis seperti komplikasi kesehatan turunan serta perkembangan hormon setiap orang. 3. terlihat dari kandungan darah didalam tubuh seseorang. Pengklasifikasian ras dapat berubah silih bergantinya waktu. Kategori-kategori yang sebelumnya disebutkan tidak selalu berbanding dengan sifat ras setiap orang. Pertimbangan yang dapat membedakan ada pada daya intelegensia, tempramen, serta karakter lainnya. Dalam hal ini, lingkungan memegang peran penting dalam membentuk kepribadian serta sifat sebuah ras (Pratama, 2016).

Wacana rasis yang sama kemudian dilanjutkan kembali oleh orang-orang berkulit gelap yang sekaligus diasingkan ke Boven-Diggle oleh pemerintah Belanda. Wacana ini dibawa ke Papua pada awal abad ke-20 melalui misionaris, Zending, dan kekuatan kolonial Belanda (Eka et al., 2021).

Di sisi lain, ada juga isu-isu seperti sengketa agraria, perampasan lahan untuk perkebunan dan hutan, serta pembangunan pertambangan yang semakin menjadi permasalahan dan tidak serta merta dibahas bersama sebagai ekspresi rasisme dalam pembangunan Indonesia di Papua bahwa hal itu akan dilakukan, perbedaan ras ini pada akhirnya berujung pada rasisme berskala besar, dan sebagian masyarakat Indonesia yang tidak memahami pentingnya toleransi terhadap keberagaman tanpa sadar.

1) Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Diskriminasi Terjadi Warga Papua

Diskriminasi terhadap masyarakat adat Papua masih menjadi isu mendesak, berkontribusi terhadap konflik dan intoleransi terhadap keberagaman. Masalah ini terjadi karena suatu alasan. Wacana rasis yang sama kemudian dilanjutkan kembali oleh orang-orang berkulit gelap yang sekaligus diasingkan ke Boven-Diggle oleh pemerintah Belanda, Wacana ini dibawa ke Papua pada awal abad ke-20 melalui misionaris, Zending, dan kekuatan kolonial Belanda (Eka et al. 2021). Perbedaan ras ini pada akhirnya berujung pada rasisme berskala besar, dan sebagian masyarakat Indonesia yang tidak memahami pentingnya toleransi terhadap keberagaman tanpa sadar menjadi menimbulkan terjadinya kerusuhan masal dan pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat Papua di berbagai tempat.

Dalam beberapa buku "Papua Road Map, Negotiating the Past, Improving the Present, and Securing the Future", di tahun 2008 Tim peneliti dari LIPI menjelaskan terdapat empat sumber konflik di Papua, yaitu 1) Sejarah Kolonialisme dan Diskriminasi: Sejarah panjang kolonialisme dan diskriminasi telah menciptakan struktur sosial dan politik yang meminggirkan masyarakat Papua. 2) Kurangnya pendidikan dan kesadaran: Banyak orang non-Papua yang kurang memahami atau tertarik pada sejarah dan budaya Papua, serta kurangnya pendidikan mengenai hak asasi manusia dan anti-diskriminasi. 3) Prasangka dan Stereotip Rasial: Prasangka dan stereotip yang berkembang di masyarakat semakin memperkuat pandangan negatif dan perlakuan diskriminatif terhadap masyarakat Papua. 4) Pendekatan Represif terhadap Keamanan: Pendekatan pemerintah yang seringkali menggunakan kekuatan militer untuk menyelesaikan permasalahan Papua telah memperburuk hubungan antara Papua dan pemerintah serta menimbulkan ketegangan rasial.

5) Kesenjangan ekonomi dan sosial: Kesenjangan ekonomi dan sosial antara Papua dan wilayah lain di Indonesia menyebabkan ketidakpuasan dan meningkatkan rasa ketidakadilan.

Kurangnya keterwakilan politik: Kurangnya keterwakilan masyarakat Papua dalam proses pengambilan keputusan politik di tingkat lokal dan nasional.

Memerangi rasisme terhadap masyarakat Papua memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup pendidikan anti-diskriminasi, reformasi politik, peningkatan kesadaran hak asasi manusia dan langkah-langkah untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi semua orang.

2) Tindakan Rasisme yang Ada Di Papua

Terdapat berbagai persoalan serta okan yang terjadi kepada masyarakat yang berasal dari Papua. Selain identitasnya, faktor etnis menjadi pematik timbulnya perbuatan penindasan serta diskriminasi warga Papua. Sebagai kaum minoritas, penduduk asli Papua seringkali dijadikan bahan bulan-bulanan diskriminasi warna kulit oleh oknum dengan kulit putih. Pastinya, perbuatan tersebut menggambarkan berbagai faktor yang dijadikan tolak ukur dalam pengkajian dan analisa untuk menelaah akar masalahnya. Di Papua, sering terjadi perbuatan anarki antar suku yang meletus di pelosok Papua, sehingga menimbulkan bentrokan yang berlarut-larut. Contohnya, pada tahun 2010, pertempuran terjadi selama 3 hari berturut-turut karena pertempuran yang melibatkan dua pihak, kelompok atas Mambruk II dan kelompok bawah Tunikama. Konflik ini muncul sebagai akibat dari contoh tidak etis yang dilakukan oleh suku Tunikama yang lebih rendah, yang melibatkan pemerkosaan seorang wanita Mambruk sampai dia hamil. Ketika wanita itu melahirkan, suku Mambruk menginginkan hukuman ordinary 100 juta sebagai sanksi sudah memicu perselisihan antara kedua belah pihak.

Menurut sengketa kepemilikan tanah konvensional, perang suku meletus di Mimika pada tahun 2014. Beberapa contoh sering terjadi di Papua, tidak hanya kematian anggota DPRD, tetapi juga tembakan, kecelakaan mobil, dan bahkan situasi kecil seperti nada dering yang menghina masyarakat Papua yang menimbulkan permusuhan antar kelompok. Sungguhnyanya, diantara suku di Papua, persoalan seperti batas wilayah dan hal minor lainnya kerap terjadi.

3) Kebijakan mengenai rasisme

Di Indonesia, ada beberapa kebijakan dan undang-undang yang bertujuan untuk melindungi warga dari perilaku diskriminatif dan rasialis. 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (1) "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Pasal 28 Ayat (2) "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Mengatur tindakan konkret untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi ras dan etnis di Indonesia. Menetapkan tindakan hukum bagi pelaku diskriminasi ras dan etnis, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Mencantumkan prinsip-prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang mencakup hak atas kebebasan dari diskriminasi berdasarkan ras atau etnis. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan yang bisa mengurangi risiko terjadinya diskriminasi rasial.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penerapan Prinsip-Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum Mewajibkan penegakan hukum yang

menghormati dan memenuhi standar hak asasi manusia, termasuk menghindari segala bentuk diskriminasi ras dan etnis. Program Nasional Pendidikan Karakter (PNPK) Mendorong pembentukan karakter dan sikap inklusif, serta menghormati keberagaman budaya dan etnis dalam pendidikan nasional.

Kebijakan Anti-Diskriminasi pada Tingkat Daerah banyak daerah di Indonesia telah menerapkan kebijakan anti-diskriminasi yang bertujuan untuk melindungi warga dari tindakan diskriminatif berdasarkan ras dan etnis. deklarasi Bersama Serangkaian deklarasi dan komitmen dari berbagai institusi, organisasi, dan masyarakat sipil yang bertujuan untuk menghapuskan rasisme dan diskriminasi di Indonesia. Penegakan Hukum Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana rasisme dan diskriminasi berdasarkan ras dan etnis. Kebijakan ini penting untuk memberikan perlindungan hukum kepada individu atau kelompok yang menjadi korban rasisme.

KESIMPULAN

Rasisme terhadap warga Papua merupakan isu yang memerlukan perhatian serius dan langkah-langkah konkret untuk mengatasi diskriminasi dan memastikan perlindungan hak asasi manusia. Berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan dalam upaya mengatasi rasisme terhadap warga Papua:1.) Pendidikan dan Kesadaran:- Meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati keberagaman budaya, etnis, dan ras.- Memperkenalkan program pendidikan yang mempromosikan toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan penolakan terhadap sikap rasialis.2.) Penegakan Hukum yang Adil:- Memastikan penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap kasus-kasus rasisme dan diskriminasi terhadap warga Papua.- Mendorong sistem peradilan untuk menindak tegas pelaku tindakan rasialis dan memberikan keadilan kepada korban.3.) Solidaritas dan Dukungan:- Membangun solidaritas dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, LSM, dan media, dalam menentang rasisme dan diskriminasi terhadap warga Papua.- Memberikan dukungan moral dan advokasi bagi korban rasisme untuk memperkuat suara mereka dan memperjuangkan hak-hak mereka.4.) Kebijakan Anti-Rasisme:- Mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan anti-rasisme yang jelas dan berkelanjutan, serta memastikan perlindungan hak asasi warga Papua.- Mengawasi dan mengevaluasi implementasi kebijakan anti-rasisme secara berkala untuk memastikan efektivitasnya dalam menangani isu rasisme.5.) Dialog dan Kolaborasi:- Mendorong dialog antar berbagai kelompok masyarakat untuk membangun pemahaman bersama, mengatasi stereotip negatif, dan mempromosikan kerjasama lintas etnis dalam memerangi rasisme.- Menggalang kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi terkait dalam upaya pencegahan dan penanggulangan rasisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, B. R. O'G. (2021). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. Verso.
- Ballard, C. (2018). "The Signature of Terror: Violence, Memory and Landscape at Freeport." *Ethnography*, 3(4), 435-466.
- Bertrand, J. (2019). *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia*. Cambridge University Press.
- Chauvel, R. (2019). *Constructing Papuan Nationalism: History, Ethnicity, and Adaptation*. East-West Center Washington.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua. (2019). *Papua dalam Perspektif Sejarah dan Budaya*. Penerbit Papua.

- Chir, N. (2020). Anotasi Normatif Terhadap Peraturan Daerah Tentang Transparasi. *Jambura Law Review*, 2(1), 3. Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods. Boston: Allyn and Bacon, inc.
- Defira, M. A., Wantu, M. Fence, Tome. H. A. (2020). Diskriminasi Rasial dan Etnis Dalam Prespektif Hukum Internasional. *Jurnal Legalitas*, 14(6), 1-17.
- Eka, Indah, Mirza, A. (2021). “Analisis Kasus Rasisme Papua Natalius Pigai Dalam Prespektif Teori Spiral Keheningan. *Communication*, 12(1). 2.Ful-toni. Memahami Diskriminasi: Buku Saku Untuk Kebebasan Beragama. *Jurnal Online Internasional*, 7(1). Hamid, A & Tome. (2020). Membumikan Pancasila: Upaya Pelembagaan Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat Desa. *Jurnal Al-‘Adl*, 13(1), 2.Husna, F & Aryani, A. S. (2023). Konseling Lintas Budaya dan Agama: Suatu Upaya Penanganan Diskriminasi Terhadap Mahasiswa Papua. *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia*, 9(2), 1-12.Khatimah, H. Posisi dan Peran Media dalam Kehidupan Masyarakat. *Jurnal Tasamuh*. 16.130.Kutha, Ratna Yoman. Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya. Yogyakarta: Pustaka Belajar. Lestari, J, F., Wiranata, H, I., Salim, N. (2022). Analisis Kasus Rasisme pada Masyarakat Papua dalam Sudut Pandang HAM. *Jurnal Kalacakra*, 04(01), 28-37.Nggilu, Novendri, Frence, Wantu, M. (2020). Menapak Jalan Konstitusional Menuju Zaken Cabinet: Ikhtiar Mewujudkan Pemerintah Berkualitas Konstitusi, *Jurnal Hukum*, 15(1), 2.Pamungkas & Cahyo. (2017). The Campaign of Papua Peace Network for Papua Peace Land. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 21 Issue 2, (hlm 1). Putri, M, A., Safei, A, M., Safaat, R., Jaya, M, P, B. (2022). Urgensi Toleransi Kebhinekaan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (Studi Kasus Diskriminasi dan Rasisme Terhadap Masyarakat Papua). *Internasional Waqaf Ilmu Nusantara Library*. Tijow, L, M. (2020). Kedudukan Peraturan Desa dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Nasional. *Jurnal Ius Civile*, 4(2), 1.Wibowo, A. (2016). Implementasi Toleransi Kebhinekaan pada Masyarakat Majemuk di Dusun Gumeng Kecamatan Jenawi Kabupaten Karang Anyar. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Wiratraman, H.P. (2021). Rasisme dan Penerapan Pasar Makar terhadap Kebebasan Ekspresi Politik Papua. *Jurnal Hukum*, 4(1), 49-80.
- Amnesty International. (2018). Indonesia: Unfinished Business: Police Accountability in Papua. Amnesty International.
- International Crisis Group. (2020). Indonesian Papua: A Local Perspective on the Conflict. Retrieved from <https://www.crisisgroup.org>.
- Komnas HAM. (2021). Laporan Situasi Hak Asasi Manusia di Papua. Retrieved from <http://www.komnasham.go.id>.
- UN Human Rights Council. (2020). Report on the Human Rights Situation in Papua. Retrieved from <https://www.ohchr.org>.
- The Guardian - How to Stop Racism: 5 Powerful Ways to Combat Discrimination
<https://philosophiamundi.id/index.php/philosophia/article/view/45/42>
<https://ejournal.widyamatararam.ac.id/prosiding-uwm.com/index.php/JKU/article/view/1014>
<https://www.academia.edu/download/106771983/pdf.pdf>
<https://philosophiamundi.id/index.php/philosophia/article/view/45>